

BALANCE OF POWER

FISCAL-MONETARY HARMONY FOR NATIONAL PROSPERITY



FISCAL POLICY: REFLECTING POLITICAL PRIORITIES

Discisions on decisions on taxation and spending guided by ideals of social justice and public investment.

MONETARY POLICY: STEWARD OF STABILITY

Managing inflation, and financial stability, focuses on maintaining trust and economic equilibrium.

SYNERGY AND TENSION

Fiscal and monetary measures in addresss balancee rlgoo: occasional conflicts between growth and inflation control.

ADAPTING TO NEW FRONTIERS

Digital currencies & global capital flows necessitate nimble and cohesive policy responses

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD

Rudy C Tarumingkeng: **Viskal vs. Moneter – Prioritas Politik dan Kestabilan Ekonomi**

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Rector, Cenderawasih State University, Papua (1978-1988)

Rector, Krida Wacana Christian University, Jakarta (1991-2000)

Chairman Board of Professors, IPB-University, Bogor (2005-2006)

Data Analyst and Chairman, Academic Senate, IBM-ASMI, Jakarta

URL: <https://rudyclt.com/ab/Buku-Artikel-rudyclt-23-24.htm>

© RUDYCT e-PRESS

rudyclt75@gmail.com

Bogor, Indonesia

10 October 2025

VISKAL VS. MONETER

Perbedaan **kebijakan moneter** dan **kebijakan fiskal** merupakan salah satu hal mendasar dalam ekonomi makro. Keduanya sama-sama bertujuan menjaga **stabilitas ekonomi, pertumbuhan, dan lapangan kerja**, tetapi memiliki **alat, pelaksana, dan mekanisme** yang berbeda.

Berikut penjelasan formalnya.

1 Definisi

Kebijakan fiskal (fiscal policy)

adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh **pemerintah** untuk mempengaruhi perekonomian melalui **pengaturan pendapatan dan pengeluaran negara**. Tujuannya menjaga keseimbangan antara penerimaan (pajak, dividen BUMN, dll.) dan belanja negara (infrastruktur, subsidi, gaji pegawai, transfer sosial, dll.).

Contoh: menaikkan pajak penghasilan, menaikkan anggaran infrastruktur, memberikan subsidi BBM, atau stimulus fiskal di masa krisis.

Kebijakan moneter (monetary policy)

adalah kebijakan yang dilakukan oleh **bank sentral** (misalnya Bank Indonesia) untuk mengendalikan **jumlah uang beredar dan suku bunga** guna menjaga stabilitas harga, nilai tukar, serta pertumbuhan ekonomi.

Contoh: menaikkan/menurunkan suku bunga acuan (BI rate), operasi pasar terbuka, atau pengaturan cadangan wajib minimum bank.

2 Lembaga Pelaksana

Aspek	Kebijakan Fiskal	Kebijakan Moneter
Pelaksana utama	Pemerintah (Kementerian Keuangan)	Bank Sentral (mis. Bank Indonesia)
Instrumen utama	Pajak, belanja negara, utang publik	Suku bunga, cadangan wajib, operasi pasar terbuka
Fokus kebijakan	Pendapatan dan pengeluaran negara	Jumlah uang dan kredit di perekonomian

3 Tujuan Umum

Keduanya memiliki tujuan akhir yang serupa, tetapi melalui jalur berbeda:

Tujuan	Fiskal	Moneter
Pertumbuhan ekonomi	Melalui peningkatan belanja publik (stimulus)	Melalui peningkatan investasi dan kredit (likuiditas)
Pengendalian inflasi	Mengurangi defisit atau menurunkan belanja	Menaikkan suku bunga, mengurangi uang beredar
Pengurangan pengangguran	Menciptakan lapangan kerja lewat proyek pemerintah	Menurunkan suku bunga agar investasi tumbuh
Stabilitas nilai tukar	Jarang langsung, tapi bisa lewat utang dan ekspor	Sangat langsung, melalui intervensi valuta asing

4 Mekanisme Kerja

Kebijakan Fiskal bekerja lewat **sektor riil**:

- Pemerintah menambah belanja → permintaan agregat meningkat → produksi naik → tenaga kerja diserap.
- Namun jika terlalu besar, bisa menimbulkan defisit dan inflasi.

Kebijakan Moneter bekerja lewat **sektor keuangan**:

- Bank sentral menurunkan suku bunga → pinjaman meningkat → investasi naik → pertumbuhan ekonomi terdorong.
- Sebaliknya, menaikkan suku bunga menekan inflasi tapi menurunkan aktivitas ekonomi.

5 Contoh Kasus Indonesia

- **Kebijakan fiskal:**
Pada masa pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia meningkatkan belanja kesehatan dan bantuan sosial (stimulus fiskal Rp 695 triliun). Tujuannya menjaga daya beli dan mencegah resesi.
- **Kebijakan moneter:**
Bank Indonesia menurunkan BI 7-Day Reverse Repo Rate menjadi 3,5% untuk mendukung likuiditas perbankan dan mendorong kredit ke sektor produktif.

Kedua kebijakan itu **saling melengkapi**—fiskal memberi “dorongan permintaan”, moneter memberi “dukungan likuiditas”.

6 Interaksi dan Koordinasi

Dalam praktik, efektivitas kebijakan ekonomi nasional sangat tergantung pada **koordinasi fiskal–moneter**.

Misalnya:

- Jika pemerintah menaikkan belanja publik (fiskal ekspansif) tetapi bank sentral menaikkan suku bunga (moneter kontraktif), efeknya saling meniadakan.
 - Koordinasi yang baik terlihat pada *Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)* yang mengatur kebijakan makroprudensial dan fiskal secara terpadu.
-

7 Tantangan Modern

1. **Globalisasi keuangan:** aliran modal lintas negara dapat melemahkan pengaruh kebijakan moneter domestik.
 2. **Defisit fiskal:** pembiayaan defisit melalui utang perlu dijaga agar tidak membebani APBN.
 3. **Digitalisasi ekonomi:** munculnya *digital banking* dan *cryptocurrency* menuntut kebijakan moneter yang lebih adaptif.
 4. **Krisis iklim:** baik fiskal maupun moneter mulai diarahkan untuk mendukung investasi hijau (*green financing*).
-

8 Kesimpulan

Perbedaan inti:

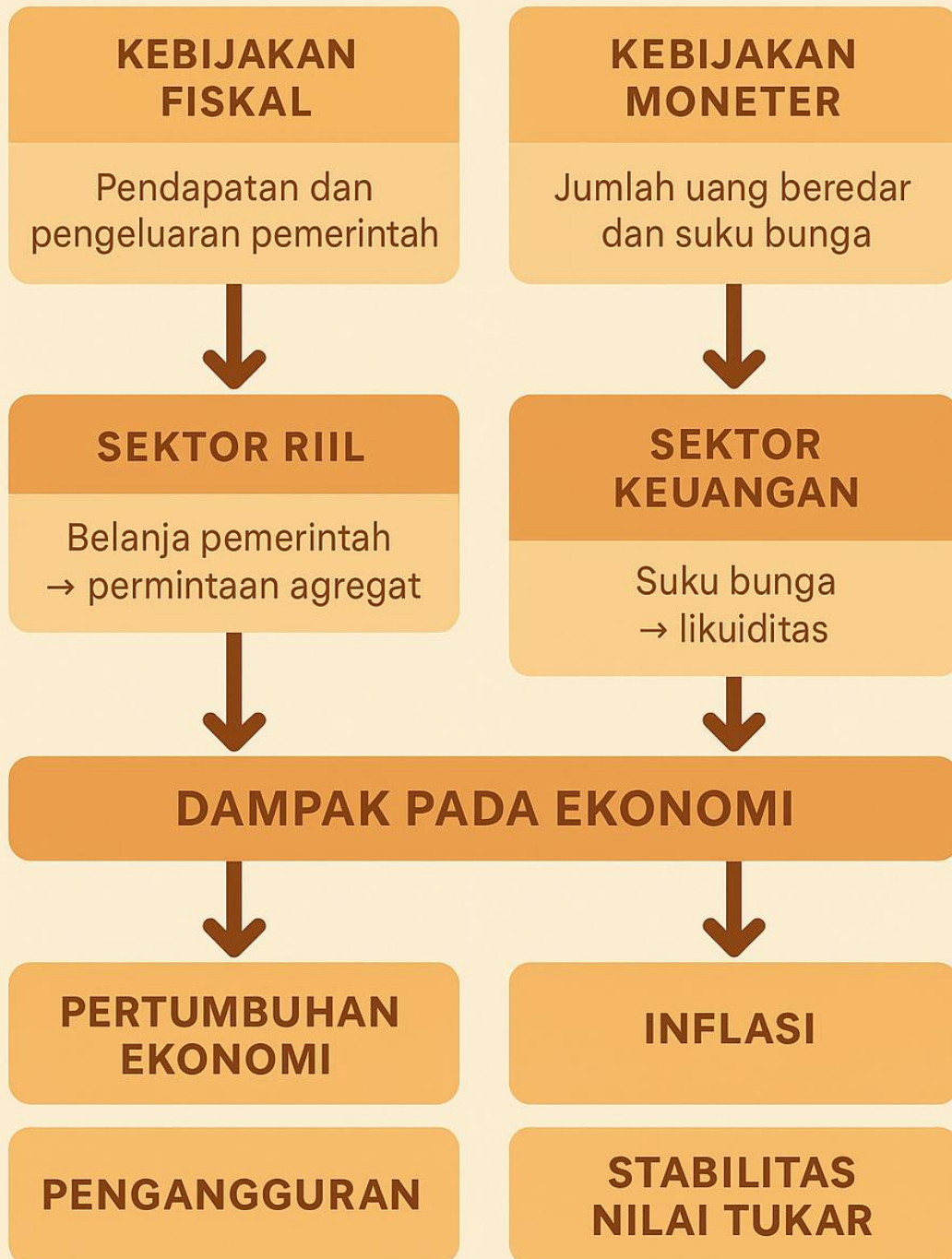
- Fiskal = uang **masuk/keluar pemerintah**.
- Moneter = **jumlah uang dan harga uang (suku bunga)** di perekonomian.

Persamaan inti:

- Keduanya adalah instrumen kebijakan makroekonomi untuk mencapai stabilitas, pertumbuhan, dan kesejahteraan.
-

Fiskal vs Moneter:

Dua Instrumen, Satu Tujuan — Stabilitas Ekonomi Nasional



Refleksi dan Diskusi

“Fiskal dan Moneter: Dua Sisi Koin Keseimbangan Ekonomi”

Dalam refleksi mendalam mengenai dua instrumen utama kebijakan ekonomi — **fiskal dan moneter**, kita melihat bahwa keduanya bukan sekadar alat teknokratis, melainkan ekspresi dari *filosofat ekonomi negara* tentang bagaimana kesejahteraan publik dicapai dan stabilitas dijaga.

Fiskal sebagai Cerminan Keputusan Politik

Kebijakan fiskal berada di jantung keputusan politik dan sosial. Setiap rupiah pajak yang dikumpulkan atau dibelanjakan mencerminkan **prioritas moral** suatu pemerintahan.

- Ketika negara memilih untuk meningkatkan belanja pendidikan atau kesehatan, itu adalah ekspresi dari nilai-nilai keadilan sosial dan investasi jangka panjang pada modal manusia.
- Sebaliknya, pengurangan subsidi atau kenaikan pajak dapat menimbulkan resistensi sosial, yang menandakan adanya **dilema antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial**.

Kebijakan fiskal karenanya merupakan **instrumen etika publik**—ia menunjukkan bagaimana negara menyeimbangkan pertumbuhan dengan pemerataan.

Moneter sebagai Seni Menjaga Kestabilan

Berbeda dengan fiskal yang politis, **kebijakan moneter lebih teknokratis dan berbasis kepercayaan**.

Bank sentral bertugas menjaga agar sistem keuangan tetap stabil, inflasi terkendali, dan nilai uang tidak tergerus.

Namun, tugas ini tidak semata bersifat matematis—melainkan psikologis dan moral.

Kepercayaan masyarakat pada mata uang dan lembaga keuangan

adalah bentuk *social capital* yang rapuh. Sekali hilang, stabilitas ekonomi bisa runtuh.

Dalam konteks Indonesia, kredibilitas Bank Indonesia dalam menjaga inflasi dan nilai tukar menjadi simbol **ketenangan makroekonomi**, terutama di tengah gejolak global.

3 Sinergi dan Ketegangan

Idealnya, kebijakan fiskal dan moneter **berjalan selaras**—saling memperkuat dalam mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

Namun dalam praktiknya, ketegangan sering muncul:

- Pemerintah cenderung ingin memperluas belanja (fiskal ekspansif),
- Sementara bank sentral mungkin ingin menaikkan suku bunga (moneter kontraktif) untuk menekan inflasi.

Ketegangan ini tidak selalu buruk—justru menjadi **“checks and balances” ekonomi**, memastikan pertumbuhan tidak melampaui kapasitas riil dan menjaga disiplin fiskal.

4 Tantangan Era Digital dan Globalisasi

Di abad ke-21, perbedaan antara fiskal dan moneter semakin kabur:

- Inovasi keuangan digital (*e-money, fintech, crypto*) menciptakan **“uang baru”** yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali bank sentral.
- Di sisi lain, **kebijakan fiskal digital** seperti subsidi langsung elektronik, pajak digital, dan belanja data-driven memperluas peran negara sebagai regulator dan inovator ekonomi.

Kedua kebijakan kini harus **beradaptasi dengan realitas baru**, di mana kecepatan informasi dan globalisasi modal menuntut respons simultan dan terintegrasi.

📏 Dimensi Etika dan Kemanusiaan

Lebih dalam lagi, perbedaan fiskal dan moneter mencerminkan **dua nilai dasar dalam etika ekonomi**:

- Fiskal: nilai **distribusi dan keadilan** (*redistribution*).
- Moneter: nilai **kepercayaan dan stabilitas** (*credibility*).

Keduanya dibutuhkan untuk membangun **ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan**.

Pertumbuhan tanpa keadilan menciptakan ketimpangan; stabilitas tanpa kesejahteraan menimbulkan stagnasi sosial.

🌐 Refleksi Akhir

Keseimbangan fiskal–moneter bukan hanya soal angka, melainkan **soal visi nasional tentang kesejahteraan**.

Dalam konteks Indonesia menuju *Golden Indonesia 2045*, sinergi keduanya menjadi kunci:

- Fiskal harus mendukung inovasi, pendidikan, dan infrastruktur,
- Moneter harus menjaga stabilitas keuangan dan memperkuat sistem pembayaran digital nasional.

Dengan harmoni antara keduanya, perekonomian tidak hanya tumbuh, tetapi juga **bermartabat, berkeadilan, dan berkelanjutan**.

Refleksi dan Diskusi (Lanjutan):

Sinergi Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Mewujudkan Kesejahteraan Nasional

Pendahuluan: Dua Pilar yang Menopang Stabilitas Ekonomi

Dalam dinamika ekonomi modern, stabilitas dan kesejahteraan nasional tidak mungkin dicapai hanya melalui satu instrumen kebijakan tunggal. Di balik setiap pertumbuhan yang berkelanjutan dan setiap periode stabilitas harga yang panjang, terdapat **dua kekuatan besar yang bekerja berdampingan: kebijakan fiskal dan moneter**.

Keduanya bagaikan dua sisi mata uang yang sama — berbeda dalam pendekatan, namun saling terkait dalam tujuan. Fiskal mengatur bagaimana negara mengelola sumber daya publik—pajak, belanja, dan utang—untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Moneter, di sisi lain, menjaga keseimbangan nilai uang, inflasi, dan stabilitas sistem keuangan agar roda perekonomian berputar tanpa terguncang.

Menyelami hubungan keduanya berarti memahami bagaimana **politik, etika, dan ekonomi** saling berinteraksi dalam menentukan arah masa depan bangsa. Refleksi ini akan mengupas secara filosofis dan empiris bagaimana sinergi kebijakan fiskal dan moneter menjadi kunci bagi pembangunan berkelanjutan, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia yang menghadapi tantangan struktural dan global sekaligus.

Dimensi Filosofis: Antara Keputusan Politik dan Disiplin Ekonomi

1.1 Fiskal sebagai Cerminan Nilai dan Keputusan Moral

Kebijakan fiskal bukan hanya kumpulan angka dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia merupakan cermin dari **sistem nilai dan keputusan moral pemerintah** dalam mengelola sumber daya masyarakat.

Setiap keputusan mengenai pajak, subsidi, dan belanja publik menyiratkan **prioritas sosial dan politik**:

- Ketika pemerintah meningkatkan anggaran pendidikan, ia menegaskan keyakinan bahwa **pembangunan manusia adalah investasi jangka panjang**.
- Ketika subsidi energi dikurangi untuk mengalihkan dana ke infrastruktur hijau, itu adalah **pernyataan moral tentang tanggung jawab antar-generasi**.
- Ketika pajak progresif diterapkan, pemerintah sedang mengoreksi ketimpangan sosial yang lahir dari pasar bebas.

Dengan demikian, kebijakan fiskal bersifat **normatif** dan **redistributif**—ia menjawab pertanyaan: *untuk siapa ekonomi ini bekerja?*

1.2 Moneter sebagai Etika Kepercayaan dan Ketertiban

Sementara itu, kebijakan moneter berakar pada **etika kepercayaan (trust ethics)**. Nilai uang hanya bermakna sejauh masyarakat mempercayainya. Kepercayaan itu dijaga oleh Bank Sentral melalui pengendalian inflasi, pengawasan kredit, dan stabilisasi nilai tukar.

Namun, kepercayaan bukan sekadar hasil hitung-hitungan statistik. Ia lahir dari **reputasi dan konsistensi kebijakan**. Bank Indonesia, misalnya, tidak hanya mengatur suku bunga, tetapi juga mengomunikasikan arah kebijakan agar pasar tidak panik. Dalam dunia modern, **komunikasi moneter** (monetary signaling) menjadi bagian dari *moral authority* bank sentral.

Dengan demikian, moneter adalah seni menjaga ketertiban ekonomi melalui kepercayaan. Jika fiskal berurusan dengan “siapa yang mendapat apa”, maka moneter berurusan dengan “berapa nilai dari apa yang kita miliki”.

❏ Perspektif Historis: Pelajaran dari Krisis dan Reformasi

2.1 Krisis Moneter Asia 1997–1998

Krisis moneter yang melanda Asia pada 1997 menjadi titik balik bagi kebijakan ekonomi Indonesia. Ketika nilai rupiah anjlok, sektor perbankan runtuh, dan harga-harga melonjak, masyarakat menyadari bahwa **stabilitas moneter adalah fondasi ekonomi nasional**.

Saat itu, lemahnya koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter memperparah keadaan. Pemerintah menambah utang dan belanja tanpa pengawasan ketat, sementara Bank Indonesia tidak mampu menahan spekulasi valuta asing. Akibatnya, inflasi melonjak hingga 77% pada tahun 1998, dan ekonomi menyusut lebih dari 13%.

Pelajaran penting dari krisis ini adalah bahwa **ketidakharmonisan antara fiskal dan moneter** dapat menimbulkan bencana makroekonomi.

2.2 Reformasi Kebijakan Pasca-Krisis

Setelah krisis, Indonesia memperkuat **independensi Bank Indonesia** (Undang-Undang No. 23 Tahun 1999) untuk menjamin kebijakan moneter bebas dari tekanan politik jangka pendek. Di sisi lain, **reformasi fiskal** dilakukan dengan memperketat pengawasan APBN dan defisit anggaran maksimal 3% dari PDB.

Sejak saat itu, koordinasi fiskal-moneter menjadi lebih sistematis melalui pembentukan **Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)**. Sinergi inilah yang menjaga perekonomian Indonesia tetap stabil menghadapi krisis global 2008 dan pandemi COVID-19 pada 2020.

3 Pandangan Teoretis: Dua Jalur, Satu Tujuan

3.1 Mekanisme Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal bekerja melalui sektor riil. Ketika pemerintah menambah belanja, permintaan agregat meningkat. Perusahaan memperluas produksi, tenaga kerja terserap, dan ekonomi tumbuh. Namun jika berlebihan, akan timbul tekanan inflasi dan defisit anggaran.

Instrumen utama fiskal mencakup:

- **Belanja publik** (stimulus ekonomi),
- **Pajak** (instrumen pendapatan dan redistribusi),
- **Utang publik** (alat pembiayaan pembangunan).

Efektivitasnya tergantung pada **kecepatan realisasi** dan **kualitas belanja**. Fiskal yang tidak tepat sasaran dapat menciptakan distorsi pasar dan moral hazard.

3.2 Mekanisme Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter bekerja melalui sektor keuangan. Bank sentral mengatur likuiditas dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga acuan, melakukan operasi pasar terbuka, atau mengatur cadangan wajib minimum bank.

Tujuan utamanya adalah:

- Menjaga **stabilitas harga (inflasi)**,
- Menjaga **stabilitas sistem keuangan**,
- Mendukung **pertumbuhan ekonomi berkelanjutan**.

Kebijakan moneter memerlukan waktu (time lag) untuk menunjukkan efeknya di sektor riil. Karena itu, koordinasi dengan kebijakan fiskal sangat penting agar tidak menimbulkan “arah berlawanan”.

4 Sinergi dalam Praktik: Pelajaran dari Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 menjadi **uji nyata koordinasi fiskal dan moneter** di Indonesia. Pemerintah meluncurkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan stimulus fiskal besar-besaran, sementara Bank Indonesia menurunkan suku bunga dan membeli Surat Berharga Negara (SBN) secara langsung untuk mendukung pembiayaan defisit.

Kolaborasi ini menghasilkan beberapa dampak penting:

1. **Stabilisasi ekonomi makro** – kontraksi ekonomi 2020 hanya -2,1%, lebih ringan dari banyak negara lain.

2. **Likuiditas terjaga** – BI menurunkan suku bunga hingga 3,5%, memudahkan sektor perbankan menyalurkan kredit.
3. **Pemulihan kepercayaan publik** – sinyal kebijakan yang konsisten membuat nilai tukar rupiah kembali stabil di kisaran Rp14.000–15.000/USD.

Namun, pengalaman ini juga mengingatkan bahwa sinergi ekstrem dapat menimbulkan risiko jangka panjang berupa **ketergantungan fiskal terhadap likuiditas moneter**. Oleh karena itu, kebijakan yang bersifat darurat harus diakhiri dengan strategi *exit policy* yang hati-hati.

❏ Ketegangan yang Tak Terhindarkan: Antara Pertumbuhan dan Stabilitas

Dalam teori ekonomi klasik, fiskal dan moneter sering berada di sisi yang berlawanan:

- Fiskal cenderung **ekspansif** untuk mendorong pertumbuhan.
- Moneter cenderung **kontraktif** untuk menekan inflasi.

Ketegangan ini, meski tampak negatif, sebenarnya adalah **mekanisme keseimbangan alami** dalam sistem ekonomi.

Jika kedua kebijakan sama-sama ekspansif, inflasi bisa melonjak. Jika keduanya kontraktif, ekonomi bisa stagnan. Oleh karena itu, diperlukan **harmoni dinamis**, bukan keseragaman.

Dalam konteks Indonesia, keseimbangan ini terlihat saat pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur (fiskal ekspansif), sementara BI menjaga agar inflasi tetap rendah di bawah 4%. Hasilnya adalah pertumbuhan yang moderat namun stabil, dengan inflasi yang terkendali.

6 Dimensi Sosial dan Etika Kebijakan

6.1 Fiskal dan Keadilan Sosial

Fiskal menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Pajak adalah kontribusi warga terhadap negara; belanja negara adalah wujud tanggung jawab negara kepada warganya.

Maka, kebijakan fiskal yang adil adalah kebijakan yang:

- Memungut pajak berdasarkan **kemampuan membayar**,
- Mengalokasikan belanja untuk **kelompok rentan dan produktif**,
- Menjaga transparansi agar tidak menimbulkan korupsi atau ketimpangan.

Pajak karbon, pajak digital, dan subsidi pendidikan adalah contoh bagaimana fiskal dapat berperan dalam **membangun masyarakat inklusif dan berkelanjutan**.

6.2 Moneter dan Etika Kepercayaan

Di sisi lain, kebijakan moneter menyangkut **hubungan kepercayaan antara negara, pasar, dan rakyat**.

Ketika bank sentral tidak kredibel, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap nilai mata uang, memicu penarikan simpanan, dan mengakibatkan krisis likuiditas.

Kepercayaan ini bukan hanya urusan teknis, tetapi **etika publik**: bagaimana otoritas keuangan bertanggung jawab menjaga stabilitas tanpa mengorbankan transparansi.

Dalam hal ini, komunikasi moneter yang jujur dan konsisten merupakan bagian dari *moral leadership* ekonomi.

II Era Digital dan Tantangan Kebijakan Baru

7.1 Fintech, Kripto, dan Uang Digital

Revolusi digital menciptakan tantangan baru bagi otoritas fiskal dan moneter. Munculnya **uang digital, cryptocurrency, dan sistem pembayaran elektronik** mengubah lanskap keuangan global. Bank sentral kini harus bersaing dengan inovasi teknologi dalam mempertahankan kendali atas likuiditas dan nilai tukar.

Sementara itu, pemerintah harus menyesuaikan kebijakan fiskal dengan ekonomi digital:

- Menarik pajak dari platform global seperti Google, Netflix, dan TikTok,
- Menyediakan infrastruktur digital bagi UMKM,
- Mengatur aliran data lintas batas sebagai aset ekonomi baru.

7.2 Sinergi Kebijakan Digital

Dalam konteks ini, sinergi fiskal–moneter juga berarti **sinkronisasi kebijakan digital**.

Fiskal menyediakan stimulus untuk transformasi digital, sedangkan moneter memastikan keamanan sistem pembayaran digital.

Contohnya, peluncuran *BI-FAST* oleh Bank Indonesia memperkuat sistem transaksi real-time, sementara pemerintah memperluas literasi digital dan UMKM Go-Online.

Sinergi seperti ini tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga menciptakan **ekosistem digital inklusif** yang memperluas partisipasi masyarakat dalam ekonomi modern.

8 Perspektif Global: Dari Keynes hingga Era ESG

8.1 Warisan Pemikiran Keynes

John Maynard Keynes menegaskan bahwa dalam masa krisis, pasar tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Negara harus hadir melalui kebijakan fiskal yang aktif.

Namun Keynes juga mengingatkan bahwa peran moneter tetap penting untuk menjaga suku bunga dan ekspektasi publik.

Pemikiran ini masih relevan hari ini: **fiskal sebagai penggerak pertumbuhan, moneter sebagai penjaga stabilitas**.

8.2 Transformasi ke Era ESG

Di era modern, kebijakan ekonomi tak lagi netral. Dunia bergerak ke arah *ESG (Environmental, Social, and Governance)* — yaitu kebijakan

ekonomi yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial.

- Fiskal harus mendukung transisi hijau melalui insentif energi terbarukan dan pajak karbon.
- Moneter harus mengintegrasikan *green finance* dalam kerangka kebijakan suku bunga dan penilaian risiko.

Sinergi fiskal–moneter yang berorientasi ESG berarti menyeimbangkan **pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian planet dan keadilan antar generasi.**

9 Kasus Indonesia: Jalan Menuju 2045

Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi kekuatan ekonomi dunia pada 2045, dengan tiga prasyarat utama:

1. Fiskal yang sehat dan berkeadilan,
2. Moneter yang stabil dan kredibel,
3. Sinergi kelembagaan yang kuat.

Program “Indonesia Emas 2045” hanya akan berhasil jika kedua instrumen kebijakan ini **terkoordinasi dengan visi jangka panjang.** Belanja negara harus diarahkan ke sektor produktif (pendidikan, riset, digitalisasi, energi hijau), sementara bank sentral harus memastikan likuiditas mendukung investasi tanpa menciptakan inflasi.

Koordinasi lintas lembaga seperti KSSK, OJK, dan LPS menjadi semakin vital dalam menghadapi kompleksitas ekonomi global. Ketika fiskal dan moneter selaras, kepercayaan publik meningkat, dan **ekonomi Indonesia menjadi tahan terhadap guncangan global.**

10 Kesimpulan Reflektif: Menuju Etika Kebijakan Ekonomi

Refleksi mendalam atas hubungan fiskal dan moneter mengajarkan satu hal penting: **ekonomi bukan hanya soal angka, tetapi soal nilai.**

Fiskal mengekspresikan keadilan sosial; moneter menegakkan kepercayaan dan ketertiban.

Keduanya harus berlandaskan integritas, transparansi, dan akuntabilitas.

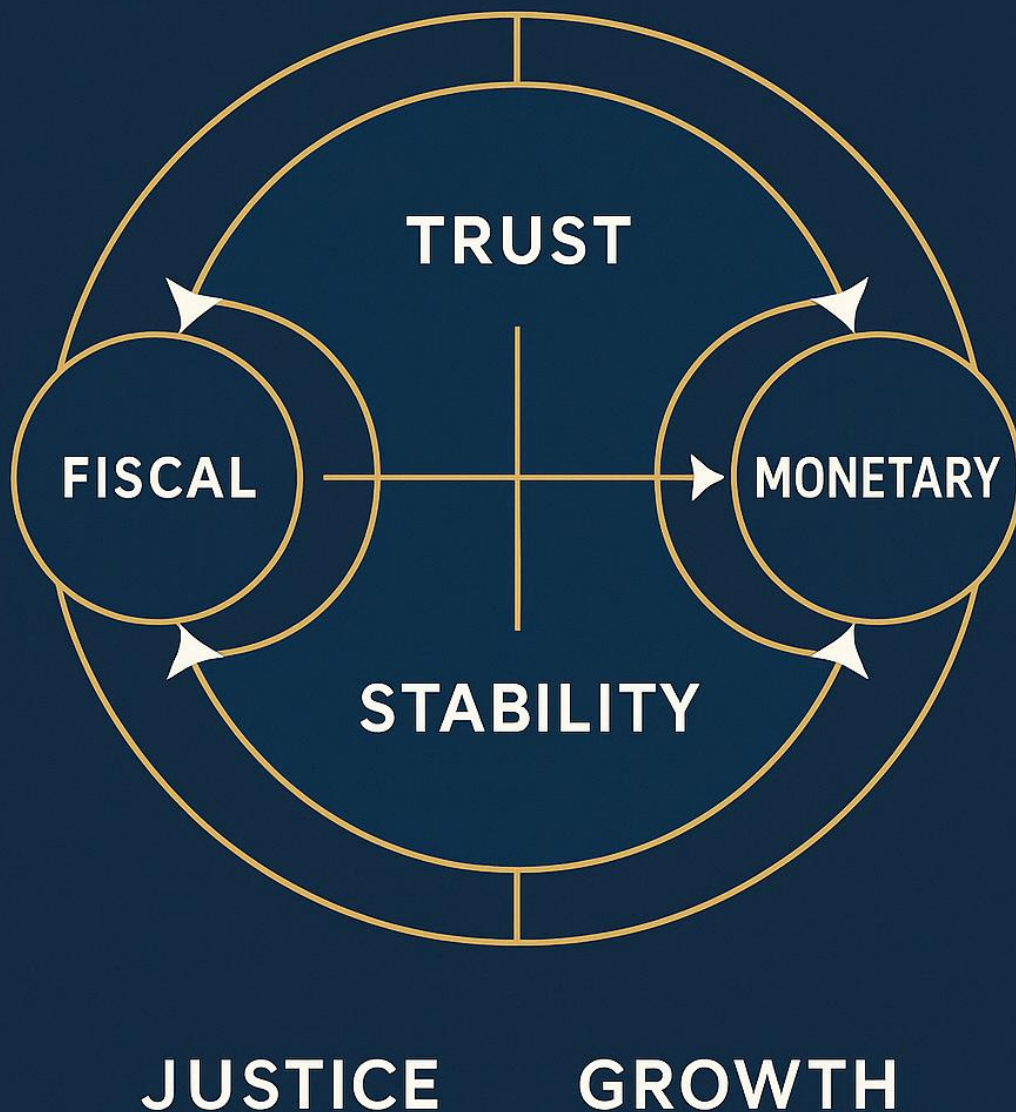
Di masa depan, tantangan ekonomi semakin kompleks — dari perubahan iklim hingga disrupsi digital. Namun prinsip dasarnya tetap sama:

Kebijakan ekonomi yang bijaksana adalah yang menyeimbangkan efisiensi dengan keadilan, pertumbuhan dengan stabilitas, dan kemajuan dengan tanggung jawab moral.

Maka, sinergi antara fiskal dan moneter bukan sekadar koordinasi teknis, tetapi juga **manifestasi dari visi etika bangsa** tentang kesejahteraan bersama.

Indonesia yang kuat bukan hanya karena ekonominya tumbuh, tetapi karena **kebijakannya bermartabat** — berpihak pada rakyat, berpijak pada integritas, dan berorientasi pada masa depan berkelanjutan.

Fiscal–Monetary and the Ethics of Economic Policy



GLOSARIUM

1 Kebijakan Fiskal (Fiscal Policy)

Strategi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian melalui instrumen pajak, belanja negara, dan utang publik. Tujuannya mencakup pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, serta stabilitas makroekonomi.

2 Kebijakan Moneter (Monetary Policy)

Tindakan yang diambil oleh bank sentral (seperti Bank Indonesia) untuk mengatur jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga, dengan tujuan menjaga stabilitas harga, nilai tukar, dan sistem keuangan.

3 Defisit Anggaran

Kondisi ketika pengeluaran pemerintah melebihi pendapatan yang diperoleh dari pajak dan sumber lainnya, sehingga perlu dibiayai dengan utang publik.

4 Inflasi

Kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode tertentu yang menyebabkan penurunan daya beli uang.

5 Likuiditas

Ketersediaan uang tunai dan kemudahan dalam mengubah aset menjadi kas. Dalam konteks moneter, likuiditas mencerminkan kelancaran sistem keuangan dan kemampuan bank menyediakan dana bagi perekonomian.

6 Suku Bunga Acuan

Tingkat bunga yang ditetapkan oleh bank sentral sebagai panduan bagi lembaga keuangan dalam menentukan bunga pinjaman dan simpanan. Di Indonesia dikenal sebagai *BI 7-Day Reverse Repo Rate*.

7 Stimulus Fiskal

Langkah-langkah ekspansif pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti peningkatan belanja publik, penurunan pajak, atau pemberian subsidi.

8 Operasi Pasar Terbuka

Salah satu instrumen moneter di mana bank sentral membeli atau menjual surat berharga pemerintah untuk mengatur jumlah uang beredar.

9 Independensi Bank Sentral

Kemandirian institusional bank sentral dalam menetapkan kebijakan moneter tanpa intervensi politik jangka pendek, demi menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap stabilitas keuangan.

10 KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan)

Forum koordinasi antar-lembaga (Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS) yang bertugas menjaga stabilitas sistem keuangan nasional dan mencegah krisis.

11 ESG (Environmental, Social, and Governance)

Kerangka kebijakan ekonomi dan investasi yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan tata kelola yang baik.

12 Uang Digital (Digital Currency)

Bentuk mata uang elektronik yang dikeluarkan dan diatur oleh bank sentral atau platform digital, memungkinkan transaksi cepat dan aman tanpa bentuk fisik.

13 Kepercayaan Publik (Public Trust)

Tingkat keyakinan masyarakat terhadap kredibilitas kebijakan ekonomi dan lembaga keuangan negara. Faktor utama yang memengaruhi stabilitas nilai tukar dan tingkat konsumsi.

14 Keadilan Sosial

Prinsip distribusi ekonomi yang memastikan semua warga negara mendapatkan kesempatan dan manfaat pembangunan secara proporsional, sebagai tujuan utama kebijakan fiskal.

15 Pertumbuhan Berkelanjutan (Sustainable Growth)

Pertumbuhan ekonomi yang berlangsung secara stabil dan inklusif, memperhatikan dimensi lingkungan dan sosial, serta menjaga keseimbangan antargenerasi.

16 Transmisi Kebijakan Moneter

Mekanisme bagaimana perubahan kebijakan moneter (misalnya suku bunga) memengaruhi variabel ekonomi riil seperti konsumsi, investasi, dan inflasi.

17 Time Lag

Jeda waktu antara pengambilan keputusan kebijakan ekonomi dengan munculnya dampak riil terhadap perekonomian.

18 Fiskal Digital

Konsep modern di mana kebijakan fiskal (pajak, subsidi, belanja) dijalankan secara digital dan berbasis data, meningkatkan efisiensi serta transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.

19 Green Finance

Pendanaan dan investasi yang diarahkan untuk mendukung proyek ramah lingkungan dan energi terbarukan, bagian dari transformasi menuju ekonomi hijau.

20 Ekonomi Bermartabat

Paradigma pembangunan ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menekankan integritas, keadilan sosial, dan tanggung jawab moral terhadap generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal Akademik

1. Blanchard, O., & Johnson, D. R. (2017). *Macroeconomics* (7th ed.). Pearson Education.
 2. Mankiw, N. G. (2020). *Principles of Economics*. Cengage Learning.
 3. Dornbusch, R., Fischer, S., & Startz, R. (2018). *Macroeconomics*. McGraw-Hill.
 4. Krugman, P., & Wells, R. (2018). *Economics*. Worth Publishers.
 5. Mishkin, F. S. (2019). *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*. Pearson.
 6. Stiglitz, J. E. (2016). *The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future*. W.W. Norton & Company.
 7. Keynes, J. M. (1936). *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. Macmillan.
 8. Friedman, M. (1968). "The Role of Monetary Policy." *The American Economic Review*, 58(1), 1–17.
 9. Lucas, R. E. (1976). "Econometric Policy Evaluation: A Critique." *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy*, 1(1), 19–46.
 10. Bernanke, B. S. (2013). *The Federal Reserve and the Financial Crisis*. Princeton University Press.
-

B. Publikasi dan Laporan Resmi

1. Bank Indonesia. (2023). *Laporan Kebijakan Moneter 2023: Menjaga Stabilitas dan Mendorong Pemulihan Ekonomi*. Jakarta: BI Press.
2. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *APBN Kita: Transformasi Fiskal untuk Kemandirian Ekonomi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran.
3. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). (2022). *Laporan Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan*. Jakarta.
4. OECD. (2022). *Fiscal Policy and Inclusive Growth*. Paris: OECD Publishing.
5. IMF. (2023). *World Economic Outlook: Balancing Growth and Inflation*. Washington, D.C.: International Monetary Fund.
6. World Bank. (2023). *Indonesia Economic Prospects: Fiscal Transformation for a Green Future*. Washington, D.C.

C. Artikel dan Sumber Internet

1. BI Institute. (2024). *Digital Rupiah and the Future of Monetary Sovereignty*.
2. OECD. (2023). *The Role of Fiscal Policy in the Green Transition*.
3. World Economic Forum (2023). *Global Competitiveness Report: Fiscal Resilience in the Age of AI*.
4. Kementerian Keuangan RI. (2022). *Transformasi Digital Fiskal Menuju Indonesia Emas 2045*.
5. Laporan Bank Dunia (2023). *Strengthening Fiscal-Monetary Coordination in Emerging Economies*.

D. Sumber Reflektif dan Etika Ekonomi

1. Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
2. Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.

3. Polanyi, K. (1944). *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time*. Beacon Press.
4. Arendt, H. (1958). *The Human Condition*. University of Chicago Press.
5. Piketty, T. (2014). *Capital in the Twenty-First Century*. Harvard University Press.
6. Tarumingkeng, R. C. (2024). *Faith and Economic Ethics: Integrating Moral Responsibility in Policy Design*. Bogor: RudyCT Publishing.

Catatan Penutup:

Glosarium dan Daftar Pustaka ini dapat digunakan untuk mendukung modul kuliah, buku ajar, atau makalah reflektif Anda mengenai *kebijakan fiskal dan moneter dalam konteks etika ekonomi dan pembangunan nasional berkelanjutan*.

Copilot for this article - Chatgpt 5, Access date: 9 October 2025.
Prompting on Writer's account ([Rudy C Tarumingkeng](https://chatgpt.com/c/68e857f4-1148-8322-b060-3c46dd2e6363))
<https://chatgpt.com/c/68e857f4-1148-8322-b060-3c46dd2e6363>